

# SKRIPSI

**FARIDA AILIN TAUFAN**

**PENCEGAHAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA (TKI) SECARA ILEGAL MELALUI  
PERMENAKER NO. : PER - 02 / MEN / 1994 DAN  
KEPMENAKER NO. : KEP - 44 / MEN / 1994**

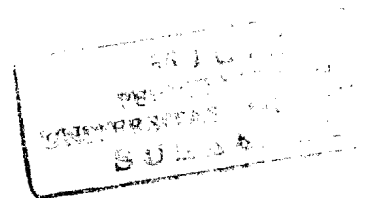


**FAKULTAS HUKUM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PENCEGAHAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA (TKI) SECARA ILEGAL MELALUI  
PERMENAKER NO. : PER - 02 / MEN / 1994 DAN  
KEPMENAKER NO. : KEP - 44 / MEN / 1994**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Bisnis Pada Fakultas Hukum Program Non Reguler  
Universitas Airlangga Surabaya



Pembimbing

**LANNY RAMLI, S.H., M.HUM**

NIP. 131 878 388

Penyusun

**FARIDA AILIN TAUFAN**

NIM. 030 010 751 U

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Informasi yang jelas, benar dan sederhana sangat diperlukan bagi pencari kerja yang berminat ke luar negeri terutama pencari kerja yang berdomisili di daerah pedesaan. Salah satu faktor pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal adalah karena gajinya lebih tinggi dari tenaga kerja yang berangkat secara legal. Selain itu, prosedur pendaftaran yang terlalu rumit bagi calon pencari kerja.
2. Penanganan masalah TKI dengan upaya hukum yang dilakukan oleh TKI Legal bila mendapat kerugian dari PJTKI maupun calo baik itu terkait dalam pengiriman TKI sebelum berangkat, sedang dalam hubungan kerja dan kepulangan TKI setelah selesai masa kontrak. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut dari segi perdata dapat menuntut ganti rugi sedangkan dari segi pidananya ditinjau dari kasus penipuan TKI ada unsur pasal 378 dan pasal 372 KUHP ( Kitab Undang – undang Pidana ).

#### **2. Saran**

1. Perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang – undangan yang mendukung untuk memperbaiki kinerja PJTKI dan petugas – petugas yang terkait dalam proses pengiriman TKI mulai dari pendaftaran, perekrutan TKI saat bekerja di luar negeri sampai kepulangannya.

2. Kurikulum yang jelas disesuaikan dengan negara tujuan CTKI dan jabatannya saat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri CTKI tentang keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri serta pengiriman CTKI ke luar negeri untuk jabatan sektor formal hendaknya lebih diprioritaskan dari pada sektor non formal.